

## PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN : M. NATSIR, AYATULLAH KHOMEINI DAN M. QURAIISH SHIHAB

Niswa Mawaddah<sup>1</sup>, Abdul Aziz Hasibuan<sup>2</sup>, Orvina Siahaan<sup>3</sup>, Marzuki<sup>4</sup>  
[niswamawaddah164@gmail.com](mailto:niswamawaddah164@gmail.com)<sup>1</sup>, [ab171512@gmail.com](mailto:ab171512@gmail.com)<sup>2</sup>, [orvinasiahaan11@gmail.com](mailto:orvinasiahaan11@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[marzuki1100000173@uinsu.ac.id](mailto:marzuki1100000173@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah hidup M. Natsir, Ayatullah khomeini dan Quraish Shihab. M. Natsir, seorang pemikir dan politisi Islam Indonesia, dikenal karena keterbukaan tentang integrasi antara agama dan negara. Ia menekankan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga sebuah sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Natsir berargumen bahwa penerapan syariat Islam dalam pemerintahan adalah cara untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ayatullah Khomeini adalah seorang ulama dan pemimpin revolusi Iran yang menyamakan rezim Shah pada tahun 1979. Khomeini memperkenalkan konsep "Wilayat al-Faqih" (Kepemimpinan Ulama), di mana negara harus dipimpin oleh seorang ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam. Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim dari Indonesia, menekankan pentingnya penafsiran kontekstual dan moderat terhadap Islam. Dalam pandangan politiknya, Shihab menekankan pentingnya toleransi, dialog antaragama, dan pluralisme.

**Kata Kunci:** M. Natsir, Ayatullah Khomeini, Quraish Shihab.

### PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam adalah disiplin yang mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan dalam konteks pemerintahan dan kehidupan publik. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, konsep-konsep seperti keadilan, musyawarah (syura), dan pemerintahan berdasarkan hukum Allah (syariah) telah menjadi landasan utama dalam teori politik Islam. Pemikiran ini mencakup beragam pandangan dan interpretasi dari berbagai pemikir dan aliran sepanjang sejarah Islam.

Muhammad Natsir adalah salah satu tokoh politik Islam yang memiliki pemikiran yang cukup berpengaruh. Dia percaya bahwa agama Islam harus menjadi dasar bagi sistem politik dan sosial suatu negara. Natsir juga menekankan pentingnya kesatuan umat Islam dalam menjaga keutuhan dan kekuatan umat Islam secara global.

Ayatullah Khomeini dikenal karena pemikiran politiknya yang menciptakan negara Islam di Iran setelah Revolusi Islam 1979. Pemikirannya menekankan penerapan syariah Islam sebagai landasan utama bagi negara dan masyarakat. Dia juga mempromosikan konsep kepemimpinan oleh ulama yang mampu mengarahkan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal dengan pemikiran moderatnya dalam konteks politik Islam. Ia sering menekankan pentingnya toleransi, perdamaian, dan dialog antaragama. Pemikirannya menekankan bahwa Islam bisa menjadi landasan moral bagi sistem politik yang inklusif dan adil, tanpa harus bersifat otoriter atau ekstrem. Dalam banyak tulisannya, ia menyoroti pentingnya interpretasi yang kontekstual dan

pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan harmonis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif, melalui library research (studi pustaka). beserta metode atau disebut juga dengan metode kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemikiran Politik Islam Modern**

Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia Islam sebagian besar berada dalam genggaman penjajahan Barat. Dalam internal umat Islam sendiri, terdapat berbagai macam permasalahan berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang menyebabkan umat Islam tidak mampu meng- hadapi kuatnya Hegemoni Barat. Umat Islam tenggelam dalam masa lalu mereka dan belum berani melakukan terobosan-terobosan baru untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Di sisi lain, penjajahan Barat terhadap dunia Islam membawa hikmah tersendiri bagi umat Islam. Adanya penjajahan tersebut telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat.

Pada saat inilah dunia Islam mulai bersen- tuhan dengan gagasan dan pemikiran Barat, pa- dahal sebelumnya kaum muslimin mendominasi percaturan politik dunia selama berabad-

abad, mulai dari Dinasti Bani Umayyah di Damaskus (661-750 M), Bani Abbasiyah di Baghdad (750-1258 M), Dinasti Bani Umayyah II di Spanyol (756-1031 M), Dinasti Safawi di Persia (1501-1736 M), Mughal di India (1526-1858 M), hingga Kekhalifahan Turki Utsmani (1300-1924). Namun, setelah kekalahan Turki Utsmani rasa percaya diri Barat semakin tinggi, terutama setelah kebangkitan Eropa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka mampu menjajah berbagai belahan dunia. Meng- hadapi penetrasi Barat ini sebagian pemikir Muslim ada yang bersikap apriori dan anti-Barat dan ada juga yang menerima mentah-mentah pemikiran Barat serta ada pula yang mencari nilai-nilai positif yang datang dari Barat, selain membuang nilai- nilai yang bertentangan dengan Islam. Dalam konteks hubungan Islam dengan negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam* berusaha untuk memaparkan secara luas perkembangan pemikiran politik abad modern yang terbagi kepada tiga arus pemikiran.

### **2. Mohammad Natsir**

#### **a. Latar Belakang Sosiopolitik Natsir**

Mohammad Natsir lahir di ranah Minang, tepatnya Alahanpanjang, Solok, 17 Juli 1908. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ranah Minang dikenal sebagai daerah pergulatan pemikiran, pergulatan antara adat dan agama, antara kelompok tradisional (Kaum Puo) dan kelompok modernis (Kaum Mudo).<sup>1</sup> Deliar Noer mencatat bahwa daerah ini memegang peranan penting dalam penyebaran cita-cita pembaruan pemikiran Islam ke daerah lain. Di daerah ini pula terlihat awal tanda- tanda pembaruan tersebut, pada saat daerah-daerah lain merasa puas dengan praktik-praktik tradisional mereka.<sup>2</sup>

Di sinilah Natsir mulai berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Islam modern ketika ia memulai pendidikan formalnya. Ia sekolah di HIS Adabiyah, Padang, sebuah sekolah modern yang didirikan Dr. H. Abdullah Ahmad (1878-1933), salah seorang pembaru di Minangkabau yang banyak menyebarkan gagasan-gagasan Muhammad Abduh (1849-1905) Sore hari ia belajar Al-Qur'an, sesuatu yang lazim dilakukan oleh anak anak Minang. Setelah menyelesaikan sekolah formal di Minangkabau, ia melanjutkan studi ke AMS di Bandung. Di sini ia berkenalan dan berguru pada Ahmad Hassan (1887-1957),

tokoh Persis yang terkenal modern, berani dan tegas dalam pendirian. <sup>3</sup>Lewat Hassan, perkenalannya pada ide-ide gerakan modern Abduh semakin dalam dan intens.

terkesan dengan Gerakan Wahhabi pimpinan Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1787 M) dan berusaha mengembangkannya di Minangkabau. Mereka bersikap tegas dan keras terhadap orang yang dianggap menyimpang dan ajaran Islam. Gerakan ini yang kemudian melahirkan gerakan Padri di Minangkabau-mulai bergerak membersihkan ajaran-ajaran Islam dari adat jahiliah dan melaksanakan hukum Islam secara mumi. Namun usaha-usaha mereka mendapat perlawanan dari kaum adat yang berusaha mempertahankan pendapat lama. Pertentangan ini akhirnya menimbulkan perang Padri (1821-1837 M). Meskipun kaum Padri mengalami kekalahan dari kaum adat (karena kaum adat meminta bantuan pada Belanda), pengaruh mereka berlanjut pada abad ke- 20 yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam Minangkabau seperti H. Abdul Karim Amrullah, Abdullah Ahmad, Abdul Hamid Hakim, dan Zainuddin Labay el-Yunusi. Lihat Hamka. Ayahku Riwayat Hidup Dr. Hap Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera utara (Jakarta. Umminda, 1982), h. 14-20.

Natsir sendiri mengakui bahwa Abduh sangat berpengaruh pada dirinya dalam membangun apresiasinya terhadap Islam. Ia, sebagaimana disampaikannya kepada Kahin, bahkan mengaku sangat terkesan pada tafsiran Abduh bahwa Islam merupakan satu sistem sosial.<sup>4</sup> Selain itu, tidak dapat dilupakan, pandangannya tentang Islam dan modernitas tentu tidak dapat terlepas dari pengaruh Haji Agus Salim. Untuk mengembangkan bakat politik dan wawasan keislamannya, di Bandung Natsir bergabung dengan Jong Islamiten Bond (JIB) yang didirikan pemuda Sjamsurijal. Bahkan ia menjabat ketua JIB cabang Bandung. Dalam JIB ini dibicarakan pandangan Islam terhadap berbagai permasalahan yang menjadi perhatian kaum terpelajar. Di sini Agus Salim berperan sebagai mentor mereka. Dalam JIB inilah Agus Salim memberi sentuhan keislaman kepada para anggota JIB, seperti Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, Yusuf Wibisono dan Prawoto serta Natsir sendiri yang kemudian mereka semua kelak menjadi tokoh-tokoh teras partai Islam modern Masyumi-sesuai dengan nuansa modern. Tokoh lain yang diakui Natsir juga berpengaruh pada pemikirannya adalah Syeikh Ahmad Soorkati (1870-1940), tokoh pendiri al-Irsyad yang sangat menentang diskriminasi dan eksklusivisme kaum Sayyid.

Latar belakang pendidikan dan pergumulan intelektual Natsir di atas menunjukkan bahwa ia sangat concern pada kemajuan Islam, ia berusaha menafsirkan Islam dalam semangat modernitas dan menjadikan Islam sebagai landasan dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Natsir memandang Islam bukan hanya sebagai agama pribadi yang memisahkan kehidupan dunia

dari agama dan moralitas. Ia kemudian di belakang hari tampil sebagai pionir bagi tegaknya cita-cita dan etika politik Islam.

Pada periode pasca-kemerdekaan Natsir mulai berkiprah di lapangan politik. Pengalamannya di JIB sangat berharga bagi perjalanan karier politiknya, terutama ketika ia memegang jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Natsir yang kemudian aktif di partai politik Masyumi, pada tahun 1946, dalam kabinet Syahrir, diangkat sebagai Menteri Penerangan. Natsir dapat bertahan dalam jabatannya ini selama tiga kabinet hingga 1949. Satu hal yang penting dicatat, pada April 1950, Natsir berjasa menyelamatkan republik ini dengan mosi integralnya yang terkenal. Mosi ini berhasil menyatukan kembali Indonesia yang terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian ke dalam republik. Seperti diketahui, baru beberapa tahun Indonesia merdeka, Belanda ingin menjajah kembali. Mereka melakukan agresi militer pertama pada 1947 dan kedua pada 1948. Akhirnya, untuk menghentikan pertikaian kedua negara ini, Belanda berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara federasi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Dengan demikian, Belanda

lebih mudah melakukan politik divide et impera-nya. Natsir segera melihat indikasi demikian sehingga mengeluarkan mosi integral. Keberhasilan ini sekaligus mengangkat pamor Natsir dan mengantarkannya ke puncak jabatan, perdana menteri. Di sinilah bakatnya sebagai administrator semakin terasah. Tidak heran kalau Herbert Feith mengungkapkan Natsir sebagai administrator berbakat yang pernah berkuasa sesudah Indonesia merdeka.<sup>5</sup>

Sejak awal Natsir berpendirian bahwa Islam bukan hanya sekadar agama pribadi yang mengurus soal-soal hubungan manusia kepada Tuhan. Islam adalah agama yang lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik kenegaraan. Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik. Memang, kalau diteliti ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi, tidak ada satu pun perintah untuk menegakkan negara. Namun bagi Natsir, negara diperlukan baik ada ataupun tidak ada perintah Islam. Menurutnya, tidak perlu ada perintah untuk mendi-rikan negara. Yang diperlukan adalah patokan-patokan untuk mengatur negara supaya negara menjadi subur dan kuat serta menjadi wasilah bagi tercapainya tujuan hidup manusia dan bagi keselamatan mereka.<sup>6</sup>

Tentang pemimpin negara, bagi Natsir, namanya bisa saja berbeda-beda dan tidak harus bergelar khalifah. Yang penting adalah bahwa kepala negara haruslah ulil amr kaum Muslimin keturunan bangsa tersebut dan sanggup menjalankan peraturan-peraturan Islam dalam susunan kenegaraan. Karenanya, Natsir mensyaratkan kepala negara haruslah berwibawa, amanah, cinta agama, dan cinta Tanah Air.<sup>7</sup> Kepala negara adalah representasi dari negara tersebut. Oleh sebab itu, syarat wibawa dibutuhkan agar apa yang diperintahkan kepala negara berjalan dengan baik

*Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962). Dalam hal ini, Feith membedakan antara tipe pemimpin pada masa itu yaitu administrator dan solidarity maker. Ciri yang pertama adalah memiliki skill administratif, teknik, kemampuan bahasa asing serta manajerial kepemimpinan modern. Pemimpin demikian menghendak kemerdekaan publik dan penegakan rule of law sebagai sendi utama bagi tegaknya demokras politik dan berfungsinya lembaga legislatif untuk mencegah munculnya otoritarianisme dan fasisme. Sementara pemimpin tipe kedua lebih menghendaki kebersamaan dalam kepemimpinan yang tunggal, menggerakkan emosi massa dan mengutamakan simbol-simbol, bahkan memanipulasi simbol-simbol tersebut untuk menyatukan berbagai kelompok yang berbeda.

dan dipatuhi oleh rakyatnya, dan amanah dibutuhkan supaya ia tidak menyimpang dari garis-garis besar ajaran Islam. Karenanya, Natsir juga mensyaratkan cinta kepada agama bagi seorang kepala negara. Menurut Natsir, memang Al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara tentang masalah-masalah teknis seperti penentuan Anggaran Belanja Negara, peraturan valuta, aturan devisa, dan 1001 permasalahan lainnya. Menurut Natsir:

"Al-Qur'an dan Sunnah hanya mengatur dasar-dasar dan pokok-pokok peraturan hubungan sesama manusia, yang tidak berubah-ubah kepentin- gannya dan keperluannya selama manusia masih bersifat manusia, baik ia manusia zaman unta ataupun manusia zaman kapal terbang, atau manusia zaman kapal statorfer dan lain-lain nanti." <sup>8</sup>

Islam mengatur sifat-sifat yang perlu ada bagi kepala negara serta hak dan kewajibannya. Agama Islam menetapkan wajibnya melakukan musyawarah terhadap permasalahan yang tidak diatur Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kemaslahatan. Islam menetapkan hak dan kewajiban antara penguasa dan rakyat. Islam menetapkan aturan pembasmi bermacam-macam penyakit masyarakat. Islam menetapkan beberapa peraturan tentang perekonomian seperti tertuang dalam kewajiban membayar zakat, sedekah, dan larangan riba.<sup>9</sup> Inilah menurut Natsir beberapa aturan baku Islam yang harus diperhatikan dan diamalkan oleh umat Islam dalam mengatur masalah-masalah

kenegaraan. Aturan-aturan ini bersifat tetap dan mengikat. Hanya saja, pelaksanaan dan teknisnya diserahkan sepenuhnya kepada umat

### **Islam sesuai dengan tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi.**

Berdasarkan pandangan ini, Natsir tidak menolak kemungkinan diterapkannya sistem pemerintahan Barat, sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran dasar Islam tersebut. Sepanjang hal itu baik dan sesuai dengan ajaran Islam, menurut Natsir, kita boleh saja mencontoh dan menirunya. Dalam hal ini, menarik dicatat pandangan Natsir tentang demokrasi Barat. Natsir yakin bahwa prinsip-prinsip Islam tentang syûrâ (musyawarah) lebih dekat dengan rumusan demokrasi modern. Natsir, dengan demikian, dapat menerima eksistensi parlemen sebagai representasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Namun Natsir menolak semangat demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler Barat. Karena itu, Natsir memandang bahwa pengambilan keputusan dalam Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip etik keagamaan. Dengan demikian, Natsir berusaha mendamaikan teori kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan. Menurut Natsir, Islam menganut paham theistic, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Dalam tataran praktis, perjuangan Natsir untuk mengimplemenasikan gagasan kenegaraannya tersebut mulai mengemuka ketika ia tampil sebagai anggota Konstituante. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dari komposisi ini terlihat tiga kekuatan politik Indonesia, yaitu nasionalis-sekuler, Islam dan marxisme/sosialisme. Dewan Konstituante yang merupakan hasil dari Pemilu 1955 bertugas menyusun dasar negara sebagai pengganti UUDS- 1950 yang bersifat sementara. Namun karena tidak ada partai pemenang mutlak, maka

perdebatan antara ketiga arus utama kekuatan politik tersebut yang kemudian hanya diwakili oleh Islam dan Pancasila- menghangat di lembaga Konstituante yang bersidang pada 1956- 1958. Dalam perdebatan ini, Natsir adalah ujung tombak bagi kelompok Islam.

Dalam pidatonya di depan Majelis Konstituante 1957, Natsir menegaskan bahwa Indonesia hanya mempunyai dua pilihan dasar negara, sekuler (lâ diniyah) atau agama (diniyah). Pancasila adalah sekuler, tidak mengakui wahyu sebagai sumbernya. Pancasila merupakan penggalian dari masyarakat yang bersifat netral agama, termasuk gagasan ketuhanannya. Dalam Pancasila, lanjut Natsir, ketuhanan hanyalah rasa adanya Tuhan tanpa wahyu. Rasa ketuhanan tersebut bersifat relatif, berganti-ganti. Karena itu, lanjut Natsir, "negara yang berdasarkan Pancasila, yang terang sudah demikian sifatnya itu, tidak dapat menjadi negara yang betul-betul mencukupi kebutuhan hidar akhirnya nyata menghunjam dalam sanubari bangsa Indonesia, Natsir Indonesia, bukan suatu negara yang sebagai suatu institution akar Menandakan bahwa suatu dasar negara hanya akan efektif berlal apabila berakar kuat pada masyarakatnya. Islam merupakan agama mayoritas bangsa Indonesia dan telah berabad-abad berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, bagi Natsir, adalah wajar kalau Islam dijadikan sebagai dasar negara.

### **3. Ayatullah Ruhullah Khomeini**

Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini adalah tokoh paling fenomenal pada abad ke-20. Ulama pemimpin Syi'ah modern ini berhasil menumbangkan sebuah rezim otoriter Reza Pahlevi di Iran melalui Revolusi Islam Syi'ah pada tahun 1979. Dengan

pengaruh kuat yang diperolehnya dari berbagai lapisan masyarakat Syi'ah Iran, ia berhasil menjatuhkan pemerintahan Shah Iran yang didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan Barat pada umumnya, serta menggantikan pemerintahan Iran yang sekuler menjadi sebuah Republik Islam Syi'ah. Iran pascarevolusi 1979 yang dipimpin oleh Imam Khomeini merupakan contoh konkret praktik kenegaraan Syi'ah yang berakar pada prinsip Imamah.

Khomeini dilahirkan pada 24 Oktober 1902 di Khomein, sebuah desa kecil di dekat

Isfahan, Iran Tengah. Secara silsilah, ayah Khomeini, Sayyid Mustafa Musawi, adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Imam Ketujuh Syi'ah, yaitu Musa al-Kazhim. Sementara ibunya adalah anak Ayatullah Mizra Ahmad, seorang teolog terkenal yang disegani. Ayatullah Sayyid Mustafa, ayah Khomeini, adalah penentang rezim tirani dinasti Qajar. Ayahnya meninggal dibunuh oleh agen rahasia penguasa Qajar pada 1903, persis ketika umur Khomeini masih tujuh bulan. Ia lalu diasuh oleh abangnya tertua yang bernama Morteza bersama ibunya. Namun pada usia enam belas tahun Khomeini, ibunya meninggal dunia.<sup>10</sup>

#### **a. Khomeini dan Wilayah-i Faqih**

Kita tidak akan dapat memahami pemikiran politik dan kenegaraan Imam Khomeini dengan baik dan utuh tanpa memahami konsep imam-mah dalam tradisi Syi'ah. Gagasan

kenegaraan Imam Khomeini tentang Wilayah al-faqih sepenuhnya bersandar pada tradisi teologi-politik Syi'ah Imamiyah tentang Imamah. Karena itu, sebelum mengelaborasi pemikiran Imam Khomeini, uraian ini terlebih dahulu membahas tentang teori Imamah Syi'ah."

Prinsip terpenting dari ajaran Syi'ah adalah tentang Imamah. Bagi Syi'ah, Imamah adalah bagian dari keyakinan keagamaan. Berbeda dengan Sunni yang menganggap bahwa Rasul SAW tidak meninggalkan pesan khusus siapa pengganti beliau kelak setelah wafat, Syi'ah memandang bahwa ada pesan khusus dari Rasul SAW tentang Ali ibn Abi Thalib yang akan menggantikan beliau kelak setelah wafat. Pesan ini disampaikan oleh Rasul SAW pada perjalanan pulang dari Haji Wada di Ghadir Khum. Ketika itu Nabi menghentikan perjalanan para jemaah.

Ahmed Vaezi menyebutkan beberapa perbedaan teori imamah dan Wilayah al-faqih Imam Khomeini dengan teori khilafah kelompok Sunni.

#### **1. Kelompok Sunni memandang bahwa kekuasaan politik merupakan kehendak Tuhan.**

Sesuai dengan teori teologi labariyah Asy'ariyah, Sunni mengatakan bahwa seseorang, hanya dengan kehendak Tuhan akan dapat mencapai kekuasaan politik. Dalam hal ini, tidak ada soal siapa yang memerintah dan bagaimana ia memperoleh kekuasaannya. Sementara dalam teori Imamah Syiah Imamiyah, kekuasaan politik harus ditunjuk langsung atau tidak langsung oleh Tuhan.

#### **2. Dalam teori khilafah Sunni, seseorang dapat memperoleh kekuasaan politik melalui penunjukan sekelompok kecil anggota**

masyarakat, wasiat dari pemimpin sebelumnya atau oleh majelis yang ditunjuk. Dalam teori Imamah Syi'ah Imamiyah, hanya ada satu cara yang sah untuk pengangkatan pemimpin, yaitu melalui penunjukan, baik secara eksplisit maupun implisit. Setelah Imam Kedua Belas gaib, para wakil imam adalah pelanjut otoritas kekuasaan politik bagi kalangan Syi'ah.

#### **3. Tentang kualitas pemimpin, dalam teori khilafah Sunni tidak terlalu ditekankan syarat adil dan jujur.**

Beberapa pemikir Sunni bahkan memberi legitimasi bagi pemimpin yang zalim. Al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah adalah tiga pemikir Sunni yang menolak oposisi terhadap kekuasaan yang despotik. Sementara dalam teori Syi'ah Imamiyah, seorang imam harus memiliki kualifikasi ma shum. Bagi wali al-faqih, meskipun tidak disyaratkan ma shum, tetap harus memiliki karakteristik sifat-sifat yang terpuji, seperti adil, jujur, dan ahli dalam bidang agama.<sup>11</sup>

#### **4. M. Quraish Shihab**

Dibandingkan dengan pemikir dan pelaku politik yang telah dibahas sebelumnya, M. Quraish Shihab tergolong "unik". Ia bukanlah seorang yang memiliki latar belakang

pelaku atau pemikir politik. Ia adalah seorang ulama tafsir kontemporer Indonesia. Sepanjang kariernya sebagai dosen, guru besar, dan ulama, Quraish Shihab tetap konsisten pada jalur tafsir Al-Qur'an. Ia tidak menulis pemikiran politiknya secara khusus dalam sebuah buku. Pemikirannya tentang hubungan antara agama dan negara terserak-serak dalam berbagai tulisannya, terutama dalam karya monumentalnya Tafsir al-Mishbah, ketika ia menafsirkan ayat-ayat

yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan. Dari karangan-karangannya tersebut kita dapat melihat butir-butir pemikirannya tentang Islam dan ketatanegaraan.

#### **a. Pemikiran Tentang Hubungan Agama dan Negara**

Quraish Shihab mengemukakan bahwa agama sangat menekankan perlunya kehadiran pemerintahan demi menata kehidupan masyarakat, bahkan demi terlaksananya ajaran agama itu sendiri. Sedemikian pentingnya masalah ini, sehingga Quraish Shihab perlu mengutip pendapat Ibn Taimiyah yang menukil sebuah riwayat bahwa enam puluh tahun sebuah negara dipimpin oleh kepala negara yang zalim lebih baik dari pada masyarakat tanpa negara dan pimpinan, meskipun hanya semalam. Menurut M. Quraish Shihab, ini diperlukan karena tanpa kehadiran pemerintahan akan terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Memang M. Quraish Shihab tidak bicara secara eksplisit tentang landasan hukum penegakan institusi negara, apakah secara syar'i atau aqli, sebagaimana pembicaraan ulama fiqh siyāsah abad klasik dan pertengahan. Namun demikian, dalam beberapa tulisannya terdapat kesan yang kuat bahwa Quraish menekankan pentingnya negara ini berdasarkan pertimbangan rasio dan kemaslahatan. Ia lebih sepakat dengan pendapat Ibn Taimiyah daripada al-Mawardi atau al-Ghazali, apalagi kelompok Khawarij.

Menurut M. Quraish Shihab, ketenteraman dan stabilitas merupakan kebutuhan mutlak masyarakat. Ini tidak dapat terwujud

tanpa undang-undang dan peraturan serta tanpa pengelola yang mengelola masyarakat tersebut. Karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, Quraish menyimpulkan bahwa betapa pun kecil dan bersahajanya, masyarakat secara sadar atau tidak akan mengangkat penguasa mereka. Ini sejalan dengan semangat ayat Al-Qur'an surat an-Nisaa', 4: 58 yang memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan sesuatu secara adil.<sup>13</sup>

Selain itu, M. Quraish Shihab beralasan pada hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui Abu Sa'd dan Abu Hurairah yang memerintahkan mengangkat salah seorang di antara tiga orang yang sedang berpergian untuk menjadi pemimpin mereka. prinsip umum yang diletakkan Islam tentang pemerintahan<sup>14</sup>.

## **KESIMPULAN**

M. Natsir, Ayatullah Khomeini dan Quraish Shihab ketiga ini memiliki pandangan yang cukup berbeda dalam konteks politik. M. Natsir, sebagai tokoh Islam Indonesia, mewakili gagasan politik Islam yang moderat dan inklusif, dengan fokus pada demokrasi dan keadilan sosial. Ayatullah Khomeini, sebagai pemimpin Revolusi Iran, memperjuangkan konsep negara Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariat Islam dan otoritas agama dalam pemerintahan. Sementara itu, Quraish Shihab, sebagai seorang pemikir Islam kontemporer dari Indonesia, sering kali menyoroti pentingnya toleransi, pluralisme, dan dialog antaragama dalam konteks politik Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiganya menghadirkan berbagai perspektif politik Islam yang unik dan beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asal mula pergolakan ini dapat dilacak pada awal abad ke-19 ketika tiga orang ulama asal Minangkabau, yaitu H. Miskin, H. Sumanik, dan H. Piobang pulang dari Tanah Suci Mekah.
- Ayahku Riwayat Hidup Dr. Hap Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera utara (Jakarta: Umminda, 1982), h. 14-20. M. Quraish shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 54
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1943*, Jakarta: LP3ES, 1982), h. 37.
- A. Hassan sangat keras menentang taklid yang ketika itu memengaruhi umat Islam. Ia menulis buku *Debat Taglied dan Risalah al-Madzhah*
- George McKahin, "Muhammad Natsir 1908-1993 Sebuah Kenangan", dalam Anwar Harjono et al., *M. Natsir Sumbangan Pemikirannya untuk Indonesia*, (Jakarta: DDIL, 1995), h. 54
- monumental Herbert Feith tentang perkembangan politik Indonesia 1950-1959 berjudul *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962).
- Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2001), h. 83.
- Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 36-37; lihat juga Ba Moin,
- Ayatullah Khomeini *Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas*", dalam Ali Rahnema ed., *Para Perintis*
- Ahmed Vaezi, *Shia Political Thought*, diterjemahkan oleh Ali Syahab, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, (Jakarta: Citra, 2006), h. 81- 83.